

Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Syuhada¹, Ade Saputra², Muhammad Syaifuddin³

^{1,2,3} Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: adasuhada894@gmail.com¹, ade19901007@gmail.com²,
muhammadsyaifudin74@gmail.com³

Abstrak

Proses paling signifikan yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, adalah sosialisasi. Kebijakan di bidang pendidikan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan moral siswa. bermaksud untuk memastikan metode yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan pendidikan, serta tahapan yang terlibat, taktik sosialisasi, dan media yang digunakan untuk melakukan sosialisasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang sesuai dengan keadaan awal dan dilihat dari sudut sosialisasi kebijakan pendidikan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa ada tiga tahap yang harus dipertimbangkan ketika mensosialisasikan kebijakan pendidikan: 1) persiapan; 2) imitasi (atau permainan); dan 3) aksi (atau permainan). Sosialisasi kebijakan pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain media elektronik (seperti CD atau compact disk), media sosial, radio, televisi, dan radio, serta media komunikasi (seperti poster, leaflet, brosur, spanduk, dan baliho).

Kata kunci: *Sosialisasi, Kebijakan, Pendidikan*

Abstract

The most significant process we go through in our everyday lives, whether we realize it or not, is socialization. Policies in education have a significant impact on students' moral development. intends to ascertain the methods used to socialize education policies, as well as the phases involved, socialization tactics, and media outlets that are used to do so. This study was conducted using a qualitative descriptive technique that was in line with the original circumstances and was seen from the standpoint of educational policy socialization. The study's findings indicate that there are three phases that should be considered while socializing educational policies: 1) preparation; 2) imitation (or play); and 3) action (or game). The socialization of educational policies can be accomplished through a variety of media, including electronic media (such as CDs or compact disks), social media, radio, television, and radio, as well as communication media (such as posters, leaflets, brochures, banners, and billboards).

Keywords: *Socialization, Policy, Education*

PENDAHULUAN

Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh para perumus kebijakan selalu dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat kemudian akan merasakan ekspresi kebijakan yang berbeda-beda tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya kebijakan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dengan maksud untuk mengatur sesuatu agar sesuai dengan tujuan bersama.

Disadari atau tidak, sosialisasi adalah proses paling signifikan yang kita lalui sehari-hari. Mendapatkan pembelajaran untuk menjadi manusia yang memberikan kontribusi

kepada masyarakat, organisasi, atau tempat kerja merupakan aspek lain dari sosialisasi. Ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan, metode, tugas, kendala, koordinasi, dan tindakan yang tepat biasanya menjadi akar penyebab permasalahan distribusi kebijakan. Ringkasnya, untuk menghindari kesalahpahaman dan miskomunikasi, sosialisasi kebijakan ini perlu dilakukan dalam kerangka organisasi menyeluruh yang memiliki prioritas, tujuan, dan materi pendukung yang jelas.

Sosialisasi merupakan proses yang terjadi setelah suatu kebijakan dikembangkan dan sebelum kebijakan tersebut masuk ke tahap implementasi, menurut Dian Herdina (2019). Oleh karena itu, tiga langkah proses kebijakan—pengembangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan—tidak mencakup sosialisasi. Hal ini sebagai landasan pemahaman sebelum mempelajari lebih lanjut tentang sosialisasi kebijakan pendidikan.

Istilah "sosialisasi" harus digunakan dengan jelas dalam kajian kebijakan pendidikan. Hal ini didasarkan pada pengetahuan bahwa lokasi inilah yang mendefinisikan dan membentuk makna dan pengertian sosialisasi. Karena sudah memahami sikap sosialisasi terhadap posisi tersebut, maka penelitian yang mendalami topik sosialisasi kebijakan dapat dilakukan dengan tepat.

Kebijakan di bidang pendidikan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan moral siswa. Seperangkat aturan dan pedoman terkait pendidikan yang dikembangkan berdasarkan isu-isu dalam konteks sosial merupakan kebijakan pendidikan. Peraturan dan ketentuan tersebut melalui beberapa tahapan, antara lain perumusan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan penilaian. Kebijakan pendidikan ini seringkali berbentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, arahan, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan lain sebagainya.

METODOLOGI

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam teknik pengambilan sampel sumber data purposive dan snowball, yang didasarkan pada filosofi postpositivis. Metode pengumpulan datanya adalah triangulasi (kombinasi), dan analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif. Temuan penelitian lebih mengutamakan makna dibandingkan generalisasi (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Proses paling signifikan yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, adalah sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksudkan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta kesadaran kritis adalah penyampaian informasi secara terbuka berupa aturan, program, dan keputusan dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain (masyarakat luas).

Cara lain untuk berpikir tentang sosialisasi adalah sebagai proses penanaman nilai-nilai hingga hasilnya adalah individu yang berkembang sepenuhnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bersosialisasi dengan sempurna; sebaliknya, mereka semua adalah orang-orang yang tidak sempurna. Memahami sesuatu yang baru yang harus dijelaskan kepada sekelompok individu yang belum terbiasa kadang disebut dengan sosialisasi. proses menjalin hubungan sosial dengan individu lain untuk memperoleh perilaku, sikap, keyakinan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk keterlibatan produktif dalam masyarakat (Damsar, 2010; 15). Aspek lain dari sosialisasi adalah mengajari seseorang cara berpartisipasi dalam masyarakat, organisasi, atau tempat kerja.

Menurut Harton dan Hunt (1989–1989), sosialisasi, secara teori, merupakan mekanisme yang membantu suatu keputusan mencapai tujuannya dalam konteks kebijakan. Sebuah program kebijakan disesuaikan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui sosialisasi. Sosialisasi didefinisikan sebagai interaksi antara kebijakan, aktor, organisasi, proses, dan teknik dengan serangkaian pelaksana, tindakan, dan tujuan yang dapat mencapai target kebijakan.

Carter V. Good (1959) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah penilaian terhadap sistem nilai dan faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam suatu lembaga sebagai rencana umum untuk memandu pengambilan keputusan, sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat tercapai. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan definisi kebijakan pendidikan sebagaimana yang dipahami saat ini.

Sosialisasi kebijakan biasanya melibatkan sejumlah isu karena masyarakat umum sering kali tidak mengetahui peraturan, proses, peran, batasan, kerja sama, dan tindakan yang tepat. Ringkasnya, sosialisasi kebijakan ini harus dilakukan dalam kerangka organisasi menyeluruh dengan prioritas, tujuan, dan sumber daya pendukung yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman dan salah tafsir. Vembriarto (2004: 106) menekankan bahwa sosialisasi kebijakan adalah suatu proses akomodatif di mana masyarakat belajar mengendalikan keinginannya sendiri, menerima nilai-nilai dan cara hidup kelompok atau komunitas di mana mereka berada, dan melakukan pengendalian diri. Konsep yang sama telah dijelaskan sebelumnya oleh George Herbert Mead pada tahun 1962 yang mengatakan bahwa sosialisasi kebijakan adalah proses dimana masyarakat mengambil perilaku, nilai-nilai, dan cara-cara baru dalam peradaban dan budaya orang lain, bagaimana masyarakat mengembangkan pribadinya agar sesuai dengan kondisi, norma, nilai, dan budaya suatu bangsa. Melalui emosi dan rasa percaya diri, orang-orang dalam budaya ini mempengaruhi orang lain di sekitar mereka, dan sosialisasi adalah proses seumur hidup.

Kebijakan Pendidikan Informasi kebijakan pendidikan disebarluaskan kepada masyarakat luas melalui sosialisasi. Media cetak dan elektronik adalah dua cara yang bisa dilakukan untuk melakukan sosialisasi ini. Sebaliknya, kebijakan merupakan pilihan organisasi yang eksplisit dan mengikat secara hukum yang mengatur perilaku dengan tujuan mengembangkan cita-cita sosial baru dan menyelesaikan masalah terkait pendidikan.

Oleh karena itu, sosialisasi pada hakikatnya adalah suatu sistem dalam lingkungan kebijakan, menurut Harton dan Hunt (1989–1989), sehingga dalam Sosialisasi Kebijakan Pendidikan suatu pilihan dapat memenuhi tujuannya. Sebuah program kebijakan disesuaikan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui sosialisasi. Sosialisasi didefinisikan sebagai interaksi antara kebijakan, aktor, organisasi, proses, dan teknik dengan serangkaian pelaksana, tindakan, dan tujuan yang dapat mencapai target kebijakan.

2. Tujuan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Tujuan dari sosialisasi kebijakan pendidikan secara umum adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sebagai upaya untuk bertanggungjawab kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyerap makna dari kebijakan tersebut. tujuan dan konsep keputusan pemerintah, dan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan keterlibatan masyarakat. ditemukan dalam siklus program kebijakan pemerintah. Khususnya pada saat ini, terdapat komitmen kerjasama dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, atau antara masyarakat dengan masyarakat untuk membuat rencana, melaksanakan, memantau secara bersama-sama, dan melakukan pengawasan. Hal ini dapat mendorong kelompok strategis dan kelompok welas asih untuk mengambil tindakan bersamaan dengan membangun pengawasan terhadap tujuan kebijakan pendidikan dan berbagi hasil inisiatif kebijakan kepada masyarakat luas di bidang pengembangan pendidikan (Dr. Arwildayanto dkk., 2018).

Kebijakan yang biasanya dikembangkan, ditetapkan, dan disetujui oleh undang-undang, peraturan, dan pilihan lain yang dibuat oleh pimpinan tentu memerlukan dukungan sosialisasi. Karena penentuan efektivitas pemberlakuan undang-undang dan peraturan yang menghasilkan produk kebijakan bergantung pada sosialisasi. Karena sosialisasi adalah proses memasukkan masukan masyarakat ke dalam norma dan ketentuan yang mengikat suatu produk kebijakan sejak dini, maka sudah seharusnya sosialisasi dilakukan. Agar isi produk kebijakan dapat dipahami dan dipraktikkan, sosialisasi juga harus dilakukan setelah disetujui dan diterbitkan. Di sinilah perlunya proses sosialisasi terhadap kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan.

Sosialisasi yang tidak memadai terhadap produk-produk kebijakan pendidikan seringkali mengakibatkan peraturan-peraturan yang tidak diantisipasi setelah diberlakukan karena baik peraturan maupun sosialisasinya tidak dilakukan pada tahap pra-perundang-undangan. Kita sering mengetahui fakta dan kenyataan mengenai hal ini, yang berarti masyarakat dan pemangku kepentingan terkait sering kali menolak produk kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan masukan mengenai cara memperbaiki rancangan produk kebijakan pendidikan—yang mencakup struktur dan isi peraturan—dan perilaku yang diharapkan mulai menyebar, para pemangku kepentingan harus mulai berpartisipasi sesegera mungkin. Hal ini akan memastikan bahwa produk akhir dapat diterima oleh semua pihak.

3. Tahapan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Proses pengenalan suatu kebijakan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, harus mempertimbangkan banyak tahapan: 1) tahap persiapan; 2) tahap peniruan (play stage); dan 3) tahap aksi (game stage). Mead (1962). Kita dapat mengukur kinerja suatu kebijakan berdasarkan tahapan sosialisasi kebijakan publik berikut ini, yang ditunjukkan oleh indikator pencapaian pada setiap tahapan berikut:

a. Tahap Persiapan (Preparatory Stage)

Seorang pemimpin menyusun peraturan, ketentuan, dan produk kebijakan yang akan dihasilkan pada tahap ini, dimulai sejak rencana kebijakan pendidikan dilaksanakan. Meskipun manfaat dan implikasinya masih dipertimbangkan, para pemangku kepentingan sudah mulai memahami dan mengasimilasikannya pada saat ini, meskipun terdapat ketidaksempurnaan. Agar proses penerimaan produk kebijakan dapat berjalan lancar dan sejalan dengan nilai dan norma yang ada pada lingkungan tersebut, maka setiap individu sebagai anggota masyarakat mempersiapkan diri dengan kebijakan yang akan ditetapkan serta memahami dan membekalinya. dengan nilai dan norma yang menjadi pedoman kebijakan tersebut.

b. Tahap Meniru (Play Stage)

Tahap imitasi didefinisikan sebagai perbaikan bertahap dalam masyarakat sebagai akibat dari kebijakan yang ditetapkan, yang mungkin mencakup perubahan peran yang akan dimainkan oleh orang dewasa. Pada tahap peniruan ini, masyarakat mulai sadar akan kebijakan baru tersebut. Pada titik ini, masyarakat bisa saja mengambil sikap terhadap kebijakan yang akan disahkan dan mulai mengambil bentuk, atau mereka bisa mulai menyadari apa yang dilakukan seorang pemimpin dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Kesadaran kolektif masyarakat mulai terbentuk sesuai dengan tujuan kebijakan.

c. Tahap Siap Bertindak (Game Stage)

Mereka sekarang lebih mahir dalam memposisikan diri untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yang memungkinkan mereka berkolaborasi dengan sempurna dalam tugas. Pada titik ini, semua orang senang, mereka mulai memberi tahu rekan-rekan mereka tentang hal itu, dan mereka secara bertahap mulai memahami undang-undang yang relevan. Pada saat yang sama, masyarakat mulai menyadari bahwa ada hukum atau adat istiadat yang mengatur lingkungannya (penghargaan).

4. Strategi Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Strategi Sosialisasi dan Kebijakan Pendidikan melalui Media Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. (Ridwan, 2023) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan dalam menerapkan kebijakan pendidikan, tergantung pada keadaan dan lingkungan sekitar unit kerja dan masyarakat. Rincian berikut akan diberikan:

- a. Mencari bantuan dari pemerintah setempat. Misalnya, sejak pertengahan tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan aturan atau pedoman terkait pendidikan dasar. Menteri dan semua pemimpin lainnya sangat ingin menerapkan kebijakan ini.

- b. Jelaskan kebijakan kepada pihak berwenang dan personel yang bekerja di lingkungan sosialisasi, tekankan nilai kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kemandirian, efisiensi, meningkatkan tanggung jawab kelembagaan, dan meningkatkan reputasi.
- c. Memberikan penjelasan kepada pelaku dan staf melalui lokakarya, seminar, atau nasihat teknis.
- d. menawarkan berbagai platform media sosial, termasuk buku, poster, booklet, CD, pamflet, dan lain sebagainya, serta menyebarkan materi tersebut ke media kepada pihak yang akan melakukan sosialisasi.
- e. Membuat pengumuman di lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan baliho atau poster, dan menyebarkan buku panduan prosedur yang direkomendasikan di pusat layanan.
- f. Memasang kebijakan di website instansi yang bertanggung jawab membuat kebijakan g. Menjadikan kebijakan tersebut sebagai teladan bagi unit kerja lain dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat serta evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- g. Gunakan kebijakan sebagai dasar bagi kepemimpinan ketika menilai pekerjaan bawahan langsung.

5. Media Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Ketika kebijakan pendidikan telah dikembangkan, kebijakan tersebut dapat dipromosikan dengan menggunakan berbagai media. Media tersebut dapat berupa media elektronik seperti CD dan compact disk, radio, televisi, dan internet, serta media komunikasi seperti poster, pamflet, brosur, spanduk, dan baliho.

Selebaran, disebut juga buklet, adalah selebaran kertas bertekstur keras yang mudah dilipat dan digunakan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kebijakan dan barang dari organisasi, seperti lembaga pendidikan. Sasaran dicapai dengan membagikan selebaran pada acara-acara tertentu atau dengan menempatkannya secara strategis. Selebaran bermanfaat karena ringan, portabel, mudah disimpan, dan tahan lama. Meskipun brosur singkat, materinya cukup menyeluruh. Selebaran digunakan untuk mengingatkan individu akan informasi yang telah dibagikan atau untuk memberi informasi kepada khalayak luas mengenai peraturan, prosedur, atau proses baru. Oleh karena itu, pamflet dapat dibagikan sebelum seminar atau acara tertentu dalam rangka sosialisasi kebijakan pendidikan. Selain itu, selebaran juga dapat dipasang untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan atau tata cara singkat penanganan berbagai permasalahan, seperti kebijakan mengenai sertifikasi dosen, pembayaran SPP, permohonan dana bantuan operasional sekolah, izin pembukaan lembaga kursus atau pelatihan, kebijakan mengenai penarikan pekerja anak, dan sebagainya, di loket layanan atau layanan publik di kantor depan.

Poster dapat memiliki berbagai fungsi dalam mensosialisasikan kebijakan pendidikan. Hal ini mencakup: 1) menguraikan sejumlah kebijakan dan manfaatnya; 2) menguraikan prosedur terkait kebijakan tersebut; 3) penawaran yang spesifik, seperti beasiswa dan persyaratan yang harus dipenuhi pelamar; dan 4) membentuk sikap atau pandangan tertentu (propaganda), seperti budaya kerja baru yang dikaitkan dengan kebijakan tersebut. Arwildayanto dkk, 2018

Kebijakan pendidikan yang baik disebarkan melalui poster yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan cepat; 2) menampilkan konsep dan materi yang menarik perhatian; 3) mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi dan membentuk opini; 4) Desain dan tampilannya mencolok sehingga menarik perhatian pembaca sehingga dapat melihat dan membacanya; 5) mempraktikkan konsep kesederhanaan (singkat, sederhana, dan tidak bertele-tele); 6) mempunyai penataan ruang yang proporsional sehingga menghasilkan pola simetris tertentu dalam partisi ruang; 7) Metodelis dalam memandu alur membaca pembaca, mendorong mereka mencari informasi sesuai urutan yang diinginkan oleh perancang poster; 8) Mampu menekankan konsep-

konsep tertentu yang berkembang menjadi gagasan atau pesan sentral. Untuk menekankan suatu hal, seseorang mungkin menempatkan grafis, foto, atau slogan/judul jauh lebih menonjol dibandingkan dengan komponen desain lainnya. Cara lain untuk menambahkan penekanan adalah dengan menyesuaikan ukuran teks atau gambar, mendesain latar belakang yang kontras dengan tulisan atau gambar, memberikan perbedaan warna yang mencolok pada beberapa teks, menggunakan berbagai font, dan sebagainya; 9) mempunyai pesan yang runtut dan jelas. Ilustrasi poster yang menampilkan kebijakan sekolah memasuki ruang kelas.

Sosialisasi kebijakan pendidikan dalam skala besar dapat dilakukan melalui papan reklame di daerah dengan lalu lintas tinggi. Baliho adalah jenis iklan yang sangat umum digunakan secara luas untuk memberi informasi kepada konsumen tentang peraturan. Pembangunan terjadi dengan sangat cepat. Billboard digital merupakan hasil billboard yang menggunakan teknologi baru di era digital. Selain itu, ada juga mobile billboard, atau papan reklame yang dipasang pada mobil iklan bergerak yang melaju. Papan reklame seluler digital menjadi hal yang umum di papan reklame seluler itu sendiri. Baliho berbentuk bidang dipasang secara permanen, ditempelkan pada bangunan dengan struktur permanen, dan dibuat dari bahan seperti kayu, logam, fiberglass, kain, kaca, dan plastik. Oleh karena itu, papan reklame juga terdiri dari papan iklan yang terletak di atas bangunan. Ilustrasi penggunaan baliho untuk berbaur dengan beasiswa kuliah.

Di Indonesia, selain reklame, selain reklame juga disebut dengan reklame. Yang membedakan adalah apakah baliho tersebut dipasang permanen atau tidak di lokasinya saat ini. Tempat (struktur) tersebut disebut dengan papan reklame baik bersifat sementara maupun semi permanen. Bahan untuk papan reklame dapat berupa fiberglass, kayu, logam, dan bahan lainnya. Materinya singkat dan berkaitan dengan peristiwa tertentu atau kegiatan insidental, seperti baliho yang mempromosikan kebijakan pendidikan. Barang poster berukuran besar telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi pencetakan format besar. Sekarang ada gaya poster yang disebut spanduk yang ukurannya jauh lebih besar daripada poster, seringkali dua hingga empat kali ukurannya. Spanduk ini dipasang di dudukan, bukan di dinding, sehingga mudah dipindahkan. Lokasi pelayanan publik seringkali menjadi tempat pemasangan spanduk. Salah satu jenis papan reklame yang digunakan oleh lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan program beasiswa universitas di antara calon pelamar dan mahasiswa saat ini untuk meningkatkan pendaftaran.

Berdasarkan dinamika kemajuan teknis di industri internet, platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, grup WhatsApp, Line, dan lainnya merupakan sarana yang paling efektif, terjangkau, dan efisien dalam mensosialisasikan kebijakan pendidikan. Bahkan dalam skala besar, hal ini dapat dicapai melalui radio, surat kabar, dan TV. Forum Diskusi Kelompok (FGD), pertemuan sosialisasi, pertemuan pimpinan, dan kegiatan lain yang termasuk dalam kategori forum sosialisasi kebijakan pendidikan dapat digunakan sebagai pengganti pertemuan tatap muka.

SIMPULAN

Masyarakat dapat mengetahui kebijakan melalui sosialisasi. Sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan sarana penyebarluasan pengetahuan tentang sikap dan tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok pengambil kebijakan dalam upaya mengatasi suatu persoalan atau permasalahan di bidang pendidikan. Untuk menumbuhkan kolaborasi dan komitmen antara masyarakat dan pemerintah, sosialisasi kebijakan pendidikan bertujuan agar masyarakat luas mampu memahami dan menginternalisasi makna tujuan dan konsep pilihan pemerintah. Dalam mensosialisasikan kebijakan pendidikan, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan: 1) tahap persiapan; 2) tahap peniruan (play stage); dan 3) tahap tindakan. (Tahap permainan). Sosialisasi kebijakan pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain media elektronik (seperti CD atau compact disk), media sosial, radio, televisi, dan radio, serta media komunikasi (seperti poster, leaflet, brosur, spanduk, dan baliho).

DAFTAR PUSTAKA

- PNPM Mandiri Perkotaan. (2009). Sosialisasi.htm (<http://www.P2Kp.org/about.asp>), diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.
- Effendy, Onong Uchyana. (1999). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arwildayanto, dkk. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif. Bandung: Cendekia Press.
- Ali Imron, (2000). Kebijaksanaan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Bumi Aksara. Hlm. 18
- Sasadara, dkk. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. Jurnal Manajemen Pendidikan. Volume: 4, No. 2.
- Aisyah, dkk., (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. Journal of Public Sector Innovations, Vol. 2, No. 1.
- A.Sari,dkk., (2010). Pengaruh Pola Komunikasi Keluarga dalam Fungsi Sosialisasi Keluarga terhadap Perkembangan Anak, Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol. 08, No.2
- Wen Yusri, dkk. (2015). Analisis Kebijakan Pendidikan Keluarga Dalam Memantapkan Perilaku Moral Anak Di Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Administrasi Pendidikan. Volume 3, No. 2.
- Nisa dan Kharisma, (2018). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pengetahuan Pelajar Mengenai Hoax, Channel, Vol. 6, No. 1. Atika Wijaya dkk, (2020). Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak, Jurnal Puruhita Vol. 2(1).
- Slamet dan Meria, (2016). Efektivitas Penggunaan Media Dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Human Traffickingdi Kabupaten Indramayu, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1–6.
- Herdiana, D. (2019). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. November.
- Ridwan, A. (2023). Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Islam. 2, 1966–1974.
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Zidna, M., & Adima, F. (2021). Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. 2(2), 42–53.
- Damsar. (2011), Pengantar Sosiologi Politik.Lampung: Kencana Prenada
- Horton, P.B dan C.L. Hunt. (1989). Sosiologi. (terjemahan, jilid 1). Jakarta: Erlangga <http://lindrilingggar.blogspot.co.id/2014/05/makalah-administrasi-pendidikan.html> diakses tanggal 26 September 2017.
- Irianto, Yoyon Bahtiar, (2012) Kebijakan Pembaruan Pendidikan (Konsep, Teori dan Model). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mead, Geoge Herbert, (1962), Mind, Self and Society, Chicago Charles W. Morris, Ed: University of Chicago Press.
- Rawita, Ino Sutisno. (2013), Kebijakan Pendidikan., Solo : Kurnia Kalam Semesta.
- Sagala, Syaiful, (2009), Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung : alfabeta.
- Udin S. Sa'ud (2002), Pengembangan Kebijakan Pendidikan Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Bandung: Jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/195306121981031-UDIN_SYAEFUDIN_SA%27UD/Kebijakan_Pend.-Bapenas_2002.pdf
- Vembriarto, (2004), Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Gramedia.